

**IMPLIKASI YURIDIS KEDUDUKAN ALIRAN  
KEPERCAYAAN DALAM PENCATATAN ADMINISTRASI  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 1/PNPS TAHUN  
1965**

**(Studi putusan penerapan Mahkamah Konstitusi no. 97/PUU-XIV/2016  
tentang aliran kepercayaan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*)**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam  
Program Studi Hukum Tata Negara



**OLEH :  
TRI SUTRISNO  
NIM. F52217051**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA  
2019**

**IMPLIKASI YURIDIS KEDUDUKAN ALIRAN  
KEPERCAYAAN DALAM PENCATATAN ADMINISTRASI  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 1/PNPS TAHUN  
1965**

**(Studi putusan penerapan Mahkamah Konstitusi no. 97/PUU-XIV/2016  
tentang aliran kepercayaan perspektif *maqāṣid al-syari'ah*)**

**OLEH :**

**TRI SUTRISNO**

**NIM. F52217051**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam  
Program Studi Hukum Tata Negara**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

**SURABAYA**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Tri Sutrisno

NIM : F52217051

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagaian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 Juni 2019

Saya yang menyatakan,



Tri Sutrisno

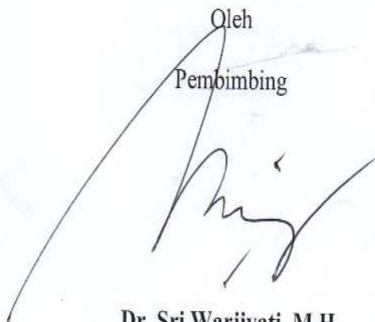
### **PERSETUJUAN**

Tesis Tri Sutrisno ini telah disetujui

Pada tanggal 05 Juli 2019

Oleh

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sri Warjiyati', is written over the printed name. The signature is fluid and cursive.

**Dr. Sri Warjiyati, M.H**

## PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul “Implikasi Yuridis Kedudukan Aliran Kepercayaan Dalam Pencatatan Administrasi Berdasarkan Undang-Undang No 1/PNPS Tahun 1965 Studi Putusan Penerapan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XIV/2016 Tentang Aliran Kepercayaan Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*” ini telah diuji Dalam Ujian

Tesisi Pada Tanggal 25 Juli 2019

Tim Penguji

1. Dr. Sri Warjiyati, M.H (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Khoirul Yahya, M.Si (Penguji I)
3. Dr. Nafi Mubarak, M.Hum (Penguji II)



Surabaya, 30 Juli 2019



Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag  
NIP. 196004121994031001



**KEMENTRIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Tri Sutrisno  
NIM : F52217051  
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana / Hukum Tata Negara  
E-mail : [sutrisnotri932@gmail.com](mailto:sutrisnotri932@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Skripsi ☒ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**IMPLIKASI YURIDIS KEDUDUKAN ALIRAN KEPERCAYAAN  
DALAM PENCATATAN ADMINISTRASI BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NO. 1/PNPS TAHUN 1965**

(Studi putusan penerapan Mahkamah Konstitusi no. 97/PUU-XIV/2016 tentang aliran kepercayaan perspektif *maqasid al-syari'ah*)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Agustus 2019

Dari ini:  
  
6000  
Tri Sutrisno

## **MOTTO**

**SETIAP SATU LANGKAH KESUKSESAN KITA TERDAPAT  
CUCURAN KERINGAT KERJA KERAS SEORANG AYAH DAN  
CUCURAN AIR MATA DOA SEORANG IBU**

## ABSTRAK

Thesis ini merupakan penelitian Library Riset yang berjudul Implikasi Yuridis kedudukan Aliran Kepercayaan dalam Pencatatan administrasi berdasarkan Undang-Undang No 1/PNPS tahun 1965 studi penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XIV/2016 tentang aliran kepercayaan perspektif *Maqāṣid Al-syari'ah*, dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu Bagaimana kedudukan aliran kepercayaan dalam pencatatan administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1965 pascaputusan No 97/PUU-XIV/2016 tentang aliran kepercayaan dan Bagaimana Perspektif *Maqāṣid Al-syari'ah* terhadap kedudukan aliran kepercayaan dalam pencatatan administrasi kependudukan berdasarkan UU No 1 Tahun 1965 pascaputusan No 97/PUU-XIV/2016 tentang aliran kepercayaan.

Dalam menjawab rumusan masalah penulis mengumpulkan data yaitu data primer dan data sekunder data primer didapat dari putusan MK No 97/PUU-XIV/2016, UU No 1/PNPS Tahun, UUD 1945, sedangkan untuk data sekunder didapat dari Jurnal, Artikel, maupun berita di surat kabar terkait penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut

Persoalan kedudukan antara Agama dan Aliran kepercayaan jika melihat pada pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yaitu ; “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk Agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu”. Dalam UUD 1945 bahasa atau frasa yang dipakai adalah “Dan” pada kalimat “Agamanya dan kepercayaan itu” penyebutan kata “Agamanya” dan kata “Kepercayaannya” secara berbarengan dengan menggunakan kata penghubung “Dan” Maka antara Agama dan kepercayaan kedudukannya sejajar dan berbeda karena jika sama maka yang ditulis adalah “Untuk beribadah menurut Agamanya itu tentunya adanya kebebasan Agama di Indonesia sejalan dengan salah satu pokok dalam *Maqāṣid Al-syārī’ah* yaitu kebebasan beragama (*hifdzu al-din*).



## ABSTRACT

This thesis is a Research Library entitled Juridical Implication of the Position of the Flowof Belief in Administrative Registration base don Law No. 1 / PNPS in 1965 study of the application of the Constitutional Court Decree No. 97 / PUU-XIV / 2016 concerning the flowof belief perspective Maqa<s {id Al-shari<ah, in this study there are two formulation sof the problem namely how the position of the flowo ftrust in there cording of population administration base don Law No. 1 of 1965 aftert hedecision No. 97 / PUU-XIV / 2016 concerning the flowof belief and How the perspective Maqa<s {id Al- shari<ah to the position of the flowof beliefin ther egristration of population administration basedon Law No. 1 of 1965 afterthedecision No. 97 / PUU-XIV / 2016 concerning the flowof belief.

In order to answer the formulation of the problem, the author collects data, namely primary data and secondary data. Primary data is obtained from the decision MK No. 97 / PUU-XIV / 2016, Law No. 1 / PNPS Year, 1945 Constitution, while for secondary data is obtained from journals, articles, and news in the chamber letter concerning the application of the Constitutional Court's Decision

The issue of the position between Religion and the flow of belief is if we look at article 29 paragraph (2) of the 1945 Constitution namely; "The state guarantees each population to embrace their respective religion and to worship according to the religion and belief". In the 1945 Constitution the language or phrase used is "And" in the sentence "His religion and belief" the mention of the word "religion" and the word "belief" together by using the conjunction "And". So between Religion and belief the position is parallel and different because if similarly what is written is "To worship according to his religion, of course there is freedom of religion in Indonesia in line with one of the points in Maqasid Al-shari'ah religious freedom (hifdzul-din).

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt. Yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Salawat serta salam, senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan Tesis ini tak lepas dari bantuan berbagai pihak, akhirnya penulis sampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak, **Prof. Dr. Masdar Hilmy, S.Ag., MA, Ph.D.** selaku Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya
2. Bapak **Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag** selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya,
3. Bapak **Dr. Khoirul Yahya, S.Ag** dan Ibu **Dr. Anis Farida, M.Si** selaku Kaprodi dan Sekprodi HTN Pascasarjana UIN Sunan Ampel.
4. **Dr. Sri Warjiyati, M.H** selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi penyusun tesis ini.
5. Bapak/Ibu dosen Pascasarjana Hukum Tata Negara yang telah memberikan wawasan guna menjadi bahan dasar timbulnya pemikiran penulis.
6. Ayah Ibuku tersayang, Bapak **Suman** dan Ibu **Endang Sunarti**, yang telah memberikan kasih sayang yang dalam, dukungan serta iringan doa yang tulus, Restu dan keridho'an mereka telah menghantarkan terselesaikannya studi penulis.
7. Kedua adikku yang selalu memberikan semangat, **Susi Setyowati, S.Ak** dan **Supriyadi, ST.**
8. Untuk Istri ku tercinta **Eni Tafrika Sari, S.Kep, Ns.** , yang selalu setia, sabar dan tulus mendampingi dan membantuku di setiap waktu dalam suka maupun duka. do'a dan dukunganmu adalah penyemangatku, hingga Tesis ini dapat selesai tepat waktu.

9. Teman-teman satu angkatan segala pihak yang telah bersedia membantu dan memberi semangat dalam proses penyusunan tesis ini. Semoga kalian selalu dalam limpahan kasih sayang Allah, sukses selalu.

Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu dengan senang hati penulis mengharapkan dan menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi menambah kesempurnaan karya ilmiah ini. Akhirnya penulis kembalikan seluruhnya kepada Allah Swt semoga berkenan meridhoi usaha ini. *Aamin.*

**Tri Sutrisno**

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	<b>1</b>
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah.....	<b>6</b>
C. Rumusan Masalah .....	<b>7</b>
D. Tujuan Penelitian .....	<b>8</b>
E. Kegunaan Penelitian .....	<b>8</b>
E. Kerangka Teoritik .....	<b>9</b>
F. Penelitian Terdahulu .....	<b>15</b>
H. Metode Penelitian .....	<b>17</b>
I. Sistematika Pembahasan.....	<b>20</b>

## A. KONSEP AGAMA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

**BAB III KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No 97/PUU-  
XIV/2016 BESERTA PENERAPANNYA**

1. Sejarah Mahkamah Konstitusi.....	47
2. Kedudukan Mahkamah Konstitusi.....	49









## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Dalam penyusunan suatu konstitusi tertulis, nilai-nilai dan Norma dasar yang hidup dalam masyarakat dan dalam praktik penyelenggaraan negara turut mempengaruhi perumusan suatu Norma ke dalam naskah Undang-Undang Dasar.

Perlu dipahami dengan seksama suasana kebatinan (*geistichenhentergrund*) yang menjadi latar belakang filosofis, sosiologis, politis, dan historis perumusan juridis suatu ketentuan Undang-Undang Dasar, sehingga ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat mengerti dengan sebaik-baiknya.

Setiap kurun waktu dalam sejarah memberikan pula kondisi-kondisi kehidupan yang membentuk dan mempengaruhi kerangka pemikiran (*frame of reference*) dengan muatan kepentingan dan medan pengalaman (*field of experience*) dengan muatan kepentingan yang berbeda, sehingga proses

pemahaman terhadap suatu ketentuan Undang-Undang Dasar dapat terus berkembang dalam praktiknya.<sup>1</sup>

Perkembangan konstitusi selain berlangsung melalui perkembangan dalam bentuk amandemen, juga dilakukan melalui praktik ketatanegaraan melalui peran badan peradilan seperti *judicial review* dan berbagai penafsiran terhadap UUD. Menurut K.C Wheare dalam buku Konstitusi-Konstitusi Modern bahwa amandemen terhadap UUD terutama tidak ditentukan oleh ketentuan hukum yang mengatur tata cara perubahan tetapi lebih ditentukan oleh berbagai kekuatan politik dan sosial yang dominan pada saat tertentu.<sup>2</sup>

Negara Indonesia adalah Negara Hukum seperti yang tertuang pada UUD 1945 pasal 1 ayat (3), pengertian dari Negara Hukum sendiri adalah bahwa setiap penduduk Indonesia berkedudukan sama di mata hukum, sehingga sebuah peraturan hukum dibuat tidak untuk menentukan keteraturan *sosial fabric* pada sebuah otoritas yang bersifat monolitik : satu obyek (bertolak dari penguasa), satu makna (menurut konsep penguasa), satu tindakan (yang diinginkan penguasa), dan satu akibat (sesuai target penguasa),<sup>3</sup> dan keberadaan UU tentang independensi lembaga peradilan menurut Oemar SeNo Adji adalah sebagai salah satu aspek esensial, bahkan unsur fundamental dalam negara hukum bagi Indonesia. Arti penting suatu peraturan hukum ialah karena hubungan yang sistematis dengan peraturan-peraturan hukum lainnya, dengan kata lain bahwa sistem hukum adalah suatu

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, (Jakarta; PT. Buana Ilmu Populer, 2009), 158

<sup>2</sup> K.C. Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, (Jakarta: Pustaka Eureka, 2003), 52

<sup>3</sup>Satjipto Rahardjo, *Wajah Hukum di Era Reformasi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 10.

Keenam agama tersebut dapat diresmikan karena Departemen Agama pada tahun 1961 mengajukan definisi agama. Suatu agama, menurut definisi itu, harus memuat unsur-unsur penting yakni Kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa, ada nabi, kitab suci, umat, dan suatu sistem hukum bagi penganutnya. Definisi tersebut disetujui oleh Presiden Soekarno waktu itu

<sup>5</sup> Moch. Sabri AR dkk, *Fikih Kebinekaan*, ( Surabaya: Mizan, 2015), 232.

yaitu “agama adalah jalan hidup dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berpedoman kitab suci dan dipimpin oleh seorang Nabi”.<sup>6</sup>

Anggapan ini kemudian memunculkan pengertian, kepercayaan di luar dari enam agama yang diresmikan tadi dianggap tidak resmi. Tentu saja, dengan definisi seperti itu banyak kelompok kepercayaan, kebatinan, atau kelompok-kelompok masyarakat yang masih mempertahankan adat istiadat dan praktik-praktik *religi local* tidak tercakup di dalamnya. Mereka digolongkan dalam “kepercayaan yang belum diakui” berdasarkan ketentuan tersebut.<sup>7</sup>

Tentunya dalam perundang-Undangan berlaku yaitu Undang-Undang No 1/PNPS Tahun 1965 antara Agama dan aliran kepercayaan berbeda, dalam Undang-Undang itu juga disebutkan bahwa antara Agama dan aliran kepercayaan berbeda, sehingga kedudukan antara agama dan aliran kepercayaan berbeda. Dalam Undang-Undang ini juga menekankan bahwa dalam pencatatan Agama dalam kolom KTP hanya untuk agama yang diakui, sedangkan untuk aliran kepercayaan dalam kolom Agama dalam KTP dikosongkan.

Keberadaan pasal 61 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pencantuman kepercayaan dalam kolom agama di KTP Elektronik, menyatakan bahwa keterangan mengenai kolom agama pada kartu keluarga bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan

<sup>6</sup> Ibid., 256

<sup>7</sup>Ibid., 318.

tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan. Selanjutnya terdapat pada pasal 64 ayat (5) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pencantuman kepercayaan dalam kolom agama di KTP Elektronik yang menyatakan bahwa keterangan tentang agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.<sup>8</sup>

Dengan adanya Undang-Undang PNPS dan diterjemahkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 bahwa antara Agama dan aliran kepercayaan adalah dua hal yang berbeda. Akan tetapi Pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No No 97/PUU-XIV/2016 tentang aliran kepercayaan dimana dalam putusannya adalah bahwa kalimat agama tidak mengikat, sehingga jika menurut putusan dari Mahkamah konstitusi tersebut secara implicit menempatkan antara agama dan aliran kepercayaan sama, sehingga dalam kolom ktp pun aliran kepercayaan bisa dimasukan.

Permasalahan yang mendasar dalam putusan mahkamah Konstitusi adalah bahwa akan adanya persamaan Agama dan aliran kepercayaan, seperti yang diketahui bahwa di Indonesia sendiri masih ada ratusan lebih aliran

<sup>8</sup> Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1)

kepercayaan yang masih berkembang, apakah dengan pengakuan aliran kepercayaan ini bisa mempertahankan eksistensi Agama itu sendiri.

Oleh karena itu, dari uraian di atas penulis memandang perlu untuk meneliti dan membahas secara mendalam tentang kedudukan aliran kepercayaan pasca putusan MK No 97/PUU-XIV/2016 dengan judul Implikasi Yuridis kedudukan aliran kepercayaan dalam pencatatan administrasi berdasarkan Undang-Undang No 1/PNPS tahun 1965 (Studi putusan Penerapan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XIV/2016 Tentang aliran kepercayaan perspektif *Maqāsid Al-syarī'ah*)

### B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :
  - a. Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dari Mahkamah Konstitusi
  - b. Prosedur pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi
  - c. Hubungan antar lembaga negara sesuai dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia.
  - d. Pertimbangan Hakim Konstitusi pada putusan No 97/PUU-XIV/2016 tentang aliran dan kepercayaan..
  - e. Peran Lembaga eksekutif dan legislatif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi.
  - f. kedudukan aliran kepercayaan dalam pencatatan administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1965 pasca putusan No 97/PUU-XIV/2016 tentang aliran kepercayaan.

a. Bagaimana kedudukan aliran kepercayaan dalam pencatatan administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1965 pasca putusan No 97/PUU-XIV/2016 tentang aliran kepercayaan ?

h. Bagaimana kedudukan aliran kepercayaan dalam pencatatan administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1965 pasca putusan No 97/PUU-XIV/2016 tentang aliran kepercayaan Perspektif *Maqāsid Al-syarī'ah*

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

a. Bagaimana kedudukan aliran kepercayaan dalam pencatatan administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1965 pasca putusan No 97/PUU-XIV/2016 tentang aliran kepercayaan?

[illegible]



Undang-Undang No 1 Tahun 1965 pasca putusan No 97/PUU-XIV/2016 tentang aliran kepercayaan ?

#### D. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang ada, penulis memberikan tujuan penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mendapatkan pengetahuan secara mendalam terkait posisi aliran kepercayaan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XIV/2016 tentang aliran kepercayaan
- b. Untuk mendapatkan gambaran tentang peran Lembaga Eksekutif dan Legislatif dalam menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XIV/2016 tentang aliran kepercayaan

## E. Kegunaan Penelitian

Dari uraian yang di atas, manfaat dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

## 1. Segi Teoritis

- a. Hasil penelitian bisa memberikan sumbangan terhadap pengembangan wawasan dalam teori pengembangan Hukum Tata Negara.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan tentang kedudukan aliran kepercayaan dan Agama
- c. Hasil penelitian ini dihaarpkan bisa menambah wawasan terhadap kedudukan aliran kepercayaan dalam pencatatan administrasi pasca putusan MK No 97/PUU-XIV/2016



## 2. Segi Praktis

- a. Bagi penulis hasil penelitian bisa dijadikan pedoman terhadap permasalahan terhadap penerapan setiap putusan Mahkamah Konstitusi dalam Bernegara dan bermasyarakat.
- b. Dapat memberikan sumbangan ide kepenulisan di perpustakaan UIN Sunan Ampel khususnya dalam kajian bidang Hukum Tata Negara
- c. Dapat memberikan sumbangan yang berguna bagi para pegiat penelitian tentang Hukum Tata Negara

## F. Kerangka Teoritik

Terdapat empat unsur penting untuk memenuhi penelitian ini yang dapat dijadikan sebagai kerangka teori, yaitu

1. Perundang-Undangan yang ada di Indonesia.

Dalam sebuah Negara tentunya terdapat aturan-aturan yang dimana bertujuan untuk mengatur masyarakat maupun mengatur terhadap jalannya sebuah pemerintahan. Dalam Negara Indonesia letak konstitusi tertinggi adalah UUD 1945 dan ini yang menjadi dasar dari aturan perundang-undangan dibawahnya, atau bisa diartikan bahwa peraturan perundang-undangan dibawahnya tidak boleh berlawanan dengan UUD 1945.

Tata urutan peraturan perundang-undangan yang biasanya disebut dengan hirarki perundang-undangan di Indonesia, antara lain :

- a. UUD 1945.
  - b. Tap MPR.
  - c. Undang-Undang.
  - d. Inpres/kepres.
  - e. Permen.
  - f. Perda
2. Kedudukan aliran kepercayaan dalam pencatatan administrasi.

Pengertian secara lengkap tentang aliran kepercayaan tidak tertulis secara jelas terutama terhadap batasan dari aliran kepercayaan, sedangkan pengertian aliran kepercayaan ada pada peraturan bersama Menteri dalam negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No 43 dan No 41 Tahun 2009 yang di maksud penganut kepercayaan adalah orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghormatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pengertian dari kepercayaan terhadap Tuhan yang maha Esa sendiri adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan local bangsa Indonesia.

Melihat dalam UU No 1 tahun 1965 PNPS bahwa antara Agama dan aliran kepercayaan adalah dua hal yang berbeda, karena dalam uu ini disebutkan bahwa di negara Indonesia setidaknya ada 6 agama

Sedangkan dalam UU ini juga menjelaskan bahwa bagi aliran kepercayaan dalam kolom agama di KTP dikosongkan atau menulis agama yang diakui, karena menurut uu ini aliran kepercayaan bukan diakui sebagai agama.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dianggap terobosan yang besar bagi sistem ketata Negaraan Negara Indonesia terutama dalam wilayah penegakan hukum, karena dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi terdapat lembaga yang khusus menangani perkara-perkara konstitusi atau perkara yang diajukan oleh warga Negara terkait UU yang ada yang merugikan atau yang tidak sesuai dengan UUD 1945. Sejarah terbentuknya Mahkamah Konstitusi sendiri berawal dari diadopsinya ide MK oleh MPR pada tahun 2001 sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan ketiga yang disahkan pada tanggal 9 November 2001. Pada tahun 2003 DPR dan Presiden

Fungsi utama dari MK sendiri adalah sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakan keadilan konstitusional ditengah kehidupan bermasyarakat. Dalam hakekatnya keberadaan mahkamah konstitusi adalah mengawal supaya konstitusi diojalankan dengan konsisten (*The guardian of constitutions*) dan menafsirkan konstitusi atau UUD 1945 (*the interpreter of consitutions*),<sup>10</sup> Dengan fungsi dan wewenang tersebut, keberadaan mahkamah konstitusi memiliki arti penting dan peranan strategis dalam perkembangan ketatanegaraan dewasa ini karena segala ketentuan atau kebijakan yang dibuat penyelenggara Negara dapat diukur dalam hal konstitusional atau tidak oleh Mahkamah Konstitusi.

“Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD; (2) memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara yang diberikan oleh UUD; (3) memutuskan pembubaran partai politik; (4) memutuskan sengketa hasil pemilu.”

<sup>10</sup> Titik triwulan tutik, Konstruksi hukum tatanegara Indonesia pasca amandemen UUD 1945 ,(Jakarta: prenada media grub, 2010), 221











## H. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Sebagai konsekuensinya maka penelitian kepustakaan (*library research*) adalah jenis penelitian yang digunakan. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data yang terdapat dalam buku-

[illegible]



terdahulu, termasuk didalamnya adalah pendapat para pakar hukum yang dibukukan, makalah serta hasil seminar yang berkaitan dengan penelitian ini dan melakukan wawancara ke Dispendukcapil tentang penerapan putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XIV/2016. .

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu informasi yang memberikan petunjuk maupun penjelasan sebagai penunjang atau penguat terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, dan ensiklopedi

### 3. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.<sup>17</sup> Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).<sup>18</sup> Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti kedudukan aliran kepercayaan berdasarkan UU No 1/PNPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XIV/2016 Tentang aliran kepercayaan

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan Hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 23.

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 113

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan kekuasaan, kewenangan Mahkamah Konstitusi dan penerapan putusan Mahkamah konstitusi.

Kegiatan yang akan dilakukan dalam analisis bahan hukum ini adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

b. Analisis yang digunakan dengan menggunakan deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan.

c. Secara teknis, analisis dari penelitian ini adalah berdasarkan pada sejarah perundang-undangan Mahkamah Konstitusi, UUD 1945 terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi.

<sup>19</sup> SugiyoNo, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2012), 126.

Sistematika pembahasan ini dipaparkan untuk mempermudah penulisan, pemahaman serta kejelasan. Agar penyusunan tesis ini bias mempermudah terhadap penulis dan juga pembaca maka tesis ini disusun dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisannya adalah:

**BAB I** Pendahuluan, menguraikan latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yakni meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengolahan data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

**BAB II** Tinjauan Pustaka, memuat landasan-landasan teori yang menjadi dasar dalam melaksanakan analisis permasalahan. Dalam tinjauan pustaka ini dikembangkan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji, yaitu : konsep agam dan kehidupan

beragama di Indonesia, Sejarah terbentuknya UUPNPS, pengertian dan dasar *Maqasid syariah*.

**BAB III** Tinjauan Umum terhadap kekuasaan dan kewenangan  
Mahkamah konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-  
XIV/2016 tentang aliran kepercayaan..

**Bab IV Analisis Pembahasan Penelitian**, memuat analisa terhadap kedudukan aliran kepercayaan dalam pencatatan administrasi berdasarkan Undang-Undang No 1 tahun 1965 PNPS studi putusan MK No 97/PUU-XIV/2016.

**Bab V** Penutup, memuat kesimpulan dan saran serta rekomendasi terhadap temuan-temuan dalam penelitian

**KONSEP AGAMA, ATURAN BERAGAMA DI INDONESIA DAN KONSEP  
MAQĀṢID AL- SYARĪAH**

Menurut Koentjaraningrat, Agama merupakan sebuah system yang setidaknya terdapat empat komponen, antara lain :

[illegible]

- a. Emosi Keagamaan yang membuat manusia bersifat atau bersikap religious.
- b. Sistem keyakinan yang terdapat unsur segala keyakinan dan bayangan manusia tentang sifat-sifat Tuhan, wujud alam ghaib, serta segala nilai Norma, dan ajaran religi yang bersangkutan.
- c. Sistem ritus dan upacara sebagai usaha manusia untuk mencari hubungan dengan Tuhan, dewa-dewa, atau makhluk halus yang mendiami alam ghaib.
- d. Umat atau kesatuan sosial yang menganut system keyakinan tersebut (2) dan yang melakukan sistem ritus dan upacara.<sup>21</sup>

Keempat komponen diatas terjalin erat satu dengan yang lainnya sehingga menjadi suatu sistem yang terintegritas secara utuh, kepentingan Agama adalah menyangkut setidaknya ada empat hal, antara lain :

- Kepentingan mengenai Emosi Agama.
- Sistem keyakinan.
- Sistem ritus.
- Umat yang merupakan satu kesatuan.

Berdasarkan hal diatas, maka secara substansi manusia sebenarnya sudah mengakui dan meyakini akan adanya Agama, meyakini adanya suatu kekuatan

<sup>21</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan, mentalitas, dan pembangunan*, (Jakarta : Gramedia, 1985), 144-145











Hukum Islam tidak dapat begitu saja diterapkan dan diberlakukan dalam suatu wilayah politik tertentu, Hukum Islam juga tidak dapat dijadikan Hukum Positif, kecuali telah diterima sebagai Hukum Nasional.

Yang dimaksud Negara sekuler disini adalah pemisahan Agama dan Negara sehingga Negara tidak menjadikan agama menjadi instrument politik tertentu. Karena itu tidak adanya ketentuan-ketentuan keagamaan yang diatur melalui legalisasi Negara. Karena Agama adalah mempunyai urusan dengan para pengikutnya bukan ada sangkut pautnya terhadap Negara, Dengan demikian dapat dikatakan Negara sekuler adalah jika suatu Negara tidak menjadikan kitab suci sebagai dasar Konstitusi dan tidak menjadikan Hukum Agama menjadi Hukum Nasional, adas dasar itu semua Agama mempunyai porsi yang sama dan tidak ada yang di istimewa.<sup>30</sup>

## **B. Pengaturan tentang kehidupan Beragama di Indonesia.**

### **1. Sejarah terbentuknya Undang-Undang No. 1/PNPS/1965**

Dalam system Negara sekuler, Agama, dan kehidupan beragama sama sekali tidak menjadi obyek perlindungan Negara. Sebaliknya di Negara teokrasi (Negara Agama) Agama dan kehidupan beragama merupakan benda hukum tersendiri yang perlunya dilindungi oleh Negara.

---

<sup>30</sup> Denny JA, Islam, Negara Sekuler, dan Demokrasi, (Jakarta : Putra Berdikari Bangsa, 2000), 17-18

(1). Negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa.

(2). Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk Agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut Agama dan kepercayaan itu.

Dari pengertian dari pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa ideologi Negara Indonesia adalah Ketuhanan yang maha esa, oleh karena itu segala sesuatu kegiatan di Negara Indonesia harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian dari prinsip ketuhanan yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perwujudan dari pengakuan keagamaan, oleh karena itu setiap orang bebas memeluk dan beribadah menurut Agama dan kepercayaan masing-masing dan berhak memperoleh perlindungan dari Negara.

[illegible]

Salah satu aturan atau Undang-Undang yang mengatur tentang agama adalah UU No 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan Agama, dalam Undang-Undang tersebut mencakup tentang 6 Agama yang diakui oleh Negara yaitu Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, dan Konghuchu. Selain ke 6 Agama yang diakui Dalam Undang-Undang tersebut Negara juga menjamin dan mengakui aliran kepercayaan yang berkembang dan hidup di Indonesia.<sup>32</sup>

<sup>32</sup> UU No 1/PNPS/ 1965 tentang Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan Agama

sudah banyak menimbulkan hal-hal yang melanggar Hukum itu sendiri dan mengakibatkan memecah persatuan Nasional.<sup>33</sup>

Undang-Undang tersebut tidak hanya memuat tentang pengakuan 6 Agama saja tapi juga tentang saksi bagi yang menyebarkan paham atau aliran-aliran yang menjurus kepada peNodaan Agama, sanksi untuk yang melanggar dikenai dengan sanksi pidana mengikuti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>34</sup>

2. Norma yang terkandung dalam UU No 1/PNPS tahun 1965.

Dalam setiap pembuat Peraturan perundang-undangan tentunya harus sesuai dengan aturan di atasnya, begitupun tentang pembuatan Undang-Undang No 1/PNPS tahun 1965, Salah satu dasar atau alas Hukum terbentuknya UU No 1/PNPS tahun 1965 adalah UUD 1945 pasal 29 tentunya dengan itu membuktikan bahwa Negara Indonesia bukan Negara yang tidak beragama (Atheis).<sup>35</sup>

Perbedaan yang mendasar dari UUD 1945 pasal 29 dan Undang-Undang No 1/PNPS tahun 1965, bahwa dalam UUD 1945 pasal 29 menjelaskan bahwa seluruh warga Negara Indonesia diberi kebebasan untuk memeluk dan menjalankan ibadah Agama masing-masing, akan tetapi tidak dijelaskan Agama apa saja yang diakui di Indonesia. Sedangkan dalam

<sup>33</sup> Lihat penjelasan dari UU No 1/PNPS Tahun 1965 point 2

<sup>34</sup> UU No 1/PNPS tahun 1965.

<sup>35</sup> Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum tata Negara Indonesia*, (Depok : Prenamedia Grub, 2017), 887



Kesimpulan dari adanya UUD 1945 pasal 29 dan UU No 1 / PNPS /1965 adalah bahwa :

1. Negara Indonesia adalah Negara Beragama
2. Negara Menjamin kebebasan memeluk dan beribadah menurut Agama dan aliran kepercayaan masing-masing.
3. Tidak ada jenis Agama yang berlaku semua agama bisa hidup di Indonesia asal berketuhanan yang maha esa dan tidak atheis.

[illegible]

### C. Konsep Maqāṣid Al- Syarīah

#### 1. Pengertian Maqāṣid al- Syarīah

Terma Maqāṣid berasal dari bahasa Arab مقاصد (*maqasid*), yang merupakan bentuk jamak kata (*maqsad*), yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan akhir.<sup>37</sup> Terma itu berarti *telos* (dalam bahasa Yunani) *finalite* (Prancis), atau *Zweck* (Jerman).<sup>38</sup> Maqāṣid hukum Islam adalah sasaran-sasaran atau maksud-maksud dibalik hukum itu<sup>39</sup>. Bagi sejumlah teoretikus hukum Islam, Maqāṣid adalah pernyataan alternatif untuk مصالح (*masalih*) atau ‘kemaslahatan-kemaslahatan’. Misalnya, Abd al-malik al-Juwaini (w.478H/1185M), salah seorang kontributor paling awal terhadap teori Maqāṣid menggunakan istilah *al- Maqāṣid* dan *al-masalih al-ammah* (kemaslahatan-kemaslahatan umum secara bergantian)<sup>40</sup>

Ada banyak pendapat ulama dalam mengartikan kata Maqāṣid AL-Syarīah diantaranya adalah:

<sup>37</sup> Mohammad al-Tahir ibn Ashur, *Treatise on Maqasid al-Syari'ah*, terjemahan Muhammad al-Tahir al-Mesaw.i. (London, Washington: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2006), 2

<sup>38</sup> Rudolf von Jhering, *Law as a Means to an End (Der Zweck im Recht)*, terjemahan Isaac Husik, edisi ke-2 (New jersey: The Lawbook Exchange (pada mulanya dipublikasikan pada 1913 oleh Boston Book Co.)2001), 35

<sup>39</sup> Ibn Asyur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, 183

<sup>40</sup> Abdul Malik al-Juwaini, *Ghiyas al-Umam fi Iltiyas al-Zulam*, ed. Husayn 'Ali Alyadri dan Sa'id Fuda, edisi ke-1, vol.5, ('Amman: Dar al-Bayariq, 1999), 222. Lihat juga Al-Amidi, *al-Ihkam*, vol.4, 286

1. Menurut Abdul Wahab Khallaf, Maqāṣid al- Syarīah adalah keinginan pembuat hukum (*syari'*) dalam mensyariatkan hukum adalah demi kebaikan ummat manusia
2. Menurut Wahbah Zuhaili, Maqāṣid al- Syarīah berarti nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersit dalam segenap satu bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia *syari'ah*, yang ditetapkan oleh *al-Syari'* dalam setiap ketentuan hukum<sup>41</sup>
3. Menurut Imam Ghazali, Maqāṣid al- Syarīah adalah maslahat yang dicapai oleh manusia baik dunia maupun akhirat, baik maslahat itu dicapai dengan *jalbu al manafi'* (meraih manfaat) atau dengan cara *daf'u al-dharar* (menolak bahaya)
4. Menurut Amir Syarifuddin, Maqāṣid al- Syarīah adalah tujuan hukum yang ditetapkan oleh Allah demi kemaslahatan umat manusia
5. Menurut Syatibi, Maqāṣid al- Syarīah adalah maslahah atau kebaikan dan kesejahteraan ummat manusia
6. Menurut Musthofa Dib al-Bugho sesungguhnya Maqāṣid al- Syarīah itu hanya ditujukan untuk merealisasikan kebahagiaan yang hakiki bagi mereka<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Wahbah Zuhaili, *Ad Dharurotus Syari'ah* (Beirut : Muassatul Ar- Risalah, tt) 20

<sup>42</sup>Hambadi al-Ubaidi, *As-Syatibi wa Maqasidus Syari'ah* (Beirut; Darul Kutub, tt) 30

Dari beberapa definisi diatas ada titik temu (kesepakatan) bahwa tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah demi kebaikan (maslahat) bagi ummat manusia. Ummat manusia disini diartikan secara umum tidak hanya ummat Islam saja sebagaimana dalam QS. Al-Anbiya:107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.” (QS. Al-Anbiya/21:107)

Atas dasar penegasan ayat di atas, syekh Muhammad Abu Zahra dalam kitabnya Ushul Fiqh merumuskan tiga tujuan hukum Islam<sup>43</sup>:

- a. Membina setiap individu agar menjadi sumber kebaikan bagi orang lain, tidak menjadi sumber keburukan bagi orang lain, tidak menjadi sumber keburukan bagi orang lain. Untuk mencapainya adalah melalui ibadah yang telah disyariatkan seperti shalat, puasa, dan haji. Melalui shalat seorang mukmin akan menyayangi yang lain dan tidak berlaku zalim dan keji, sejalan dengan Firman Allah SWT surat *al-ankabut* ayat 45:

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Artinya : “bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-kitab (al-Qur’an) dan dirikanlah Shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

<sup>43</sup> Sapiudin Shiddiq, *ushul fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), 223













- 1) Memelihara jiwa dalam tingkat *daruriyat* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia.
- 2) Memelihara jiwa dalam tingkat *hajiyyat* seperti dibolehkannya berburu dan menikmati makanan dan minuman yang lezat, kalau kegiatan ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia melainkan hanya akan mempersulit hidupnya saja.
- 3) Memelihara jiwa dalam tingkat *tahsiniyat* seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Hal ini, hanya berhubungan dengan masalah kesopanan dan sama sekali tidak akan mengancam jiwa manusia maupun mempersulit kehidupan manusia.

c. Memelihara akal( *Hifz al-Aql*)

Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

- 1) Memelihara akal dalam tingkat *daruriyat* seperti diharamkannya meminum minuman keras. Jika hal ini tidak diindahkan, maka aka berakibat rusaknya akal.

d. Memelihara keturunan (*Hifz an-Nasl*)

- 1) Memelihara keturunan dalam tingkat *daruriyat* seperti disyaratkannya nikah dan larangan berzina . kalau aturan ini tidak dipatuhi maka kan mengancam keutuhan keturunan
- 2) Memelihara keturunan dalam tingkat *hajiyyat*, seperti ditetapkannya menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak kepada sang suami. Jika hal ini tidak dilakukan maka akan menyulitkan sisuami karena ia harus membayar mahar misl. Adapun dalam masalah talak si suami akan mengalami kesulitan jika ia tidak menggunakan hak talaknya sedagkan situasi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi.

44

e. Memlihara Harta (*Hifz al-Mal*)

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan antara lain:

- 1) Memelihara harta dalam tingkat *daruriyat*, seperti disyariatkannya tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Jika aturan ini dilanggar maka akan mengancam keutuhan harta.
- 2) Memelihara harta dalam tingkat *hajiyat*, seperti disyariatkannya jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai maka tidak akan mengancam eksistensi harta melainkan akan mempersulit orang yang membutuhkan modal.
- 3) Memelihara harta dalam tingkat *tahsiniyat*, seperti adanya ketentuan agar menghoindarkan diri dari usaha penipuan, hal ini erat kaitannya dengan masalah etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga kan





hak-hak sipil terkandung sejumlah hak pokok, misalnya hak untuk bebas berpikir dan menyatakan pendapat, hak berkumpul, hak untuk berbeda, dan lain sebagainya. Dalam hak-hak ekonomi terkandung hak-hak seperti kebebasan gerak untuk melakukan tukar-menukar barang, hak atas hidup yang layak, hak atas asuransi kesehatan, hak atas pekerjaan, dan lain sebagainya. Dalam hak-hak budaya terkandung hak untuk melestarikan warisan budaya tertentu

## BAB III

**KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NO 97/PUU-XIV/2016 BESERTA PENERAPANNYA**

### A. Kedudukan Mahkamah Konstitusi

## 1. Sejarah Mahkamah Konstitusi.

Tinjauan sejarah ketatanegaraan Indonesia, ide awal munculnya pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah sejak dilontarkannya usul oleh Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI pada bulan Juli 1945 yakni agar Mahkamah Agung “Balai Agung” diberikan wewenang membanding Undang-Undang, tetapi usul Yamin tersebut ditolak oleh Soepomo dengan alasan Undang-Undang Dasar yang dibentuk tidak menganut “*Trias Polotika*” dan jumlah Sarjana Hukum pada saat itu jumlahnya sedikit.<sup>54</sup>

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi ini berkembang terus. Sekitar tahun 1980, muncul ide pengujian Konstitusional Undang-Undang yang diajukan oleh para Sarjana Hukum terutama dari Pengacara. Namun, usulan pengujian konstitusional Undang-Undang ditolak dengan alasan tidak tepat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Muhammad yamin, Naskah persiapan UUD 1945, jilid I, (Jakarta : Yayasan Prapanca, 1959), 341

<sup>55</sup> Jimmli Asshidiqie, Model-model pengujian Konstitusi di berbagai Negara, (Jakarta : Kompas, 2005), 1



Ditambah dengan perubahan system kelembagaan Negara dimana dalam ketatanegaraan Indonesia pasca Amandemen UUD 1945 tidak lagi menempatkan lembaga MPR sebagai lembaga supremasi atau lembaga tinggi



kekuasaan kehakiman, disamping MA. Dalam konteks anutan sistem yang demikian, lembaga negara dibedakan berdasarkan fungsi dan perannya sebagaimana diatur dalam UUD 1945. MK menjadi salah satu lembaga negara baru yang oleh konstitusi diberikan kedudukan sejajar dengan lembaga-lembaga lainnya, tanpa mempertimbangkan lagi adanya kualifikasi sebagai lembaga negara tertinggi atau tinggi. Sehingga, sangat tidak beralasan mengatakan posisi dan kedudukan MK lebih tinggi dibanding lembaga-lembaga negara lainnya, itu adalah pendapat yang keliru. Prinsip pemisahan kekuasaan yang tegas antara cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif dengan mengedepankan adanya hubungan checks and balances antara satu sama lain.

### 3. Kewenangan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi

Kewenangan Mahkamah Konstitusi terdapat dalam UUD 1945 Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:<sup>58</sup>

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pemuanan partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

<sup>58</sup>UUD 1945



Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal (*to guard*) konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah Konstitusi juga sebagai penafsir akhir konstitusi. Di berbagai negara Mahkamah Konstitusi juga menjadi pelindung (*protector*) konstitusi. Sejak di-inkorporasi-kannya hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa fungsi pelindung konstitusi dalam arti melindungi hak-hak asasi manusia (*fundamental rights*) juga benar adanya. Tetapi dalam penjelasan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan sebagai berikut:

*“... salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang menimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi”.*

Lebih jelas Jimly Asshiddiqie menguraikan:

*“Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat”.*

**B. Putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XIV/2016 Tentang aliran kepercayaan**

### 1. Pihak Pemohon dan kedudukan Pemohon

Dalam pengajuan pengujian Undang-Undang ini terdapat empat orang pemohon antara lain :

- a. Pemohon yang pertama bernama **Nggay Mehing Tena** yang bertempat tinggal di Walakari, RT 13/14, Kelurahan Wungan, Kecamatan Haharu, Sumba Timur NTT, beliau adalah adalah Warga Negara Indonesia penganut kepercayaan dari komonitas Marapu di Sumba Timur, Pulau Sumba, Nggay Mehing Tena adalah salah satu dari 21.000 orang penganut kepercayaan komunitas Merapu di Sumba Timur dan sebanyak 40 ribu orang di Sumba yang terlanggar hak atas layanan kependudukannya.

Kepercayaan Komunitas Marapu meyakini adanya kekuasaan Yang Maha Tinggi (yang dalam termin agama-agama modern disebut Tuhan atau Allah). Wujud tertinggi ini terlalu agung, sakral dan transenden, sehingga bagi penganut Marapu, menyebut namanya saja harus mematuhi berbagai ritual yang sarat mantra spiritual, seperti DAPPA NUMA NGARA, DAPPA TEKKI TAMO dalam bahasa daerah/suku Wewewa (Yang tidak boleh disebut namanya, dan tidak boleh disebut nama aliasnya).

Ungkapan sakral lain untuk menyebut Wujud Tertinggi adalah: A KANGA WOLLA LIMMA, A BOKKA WOLLA WA'I – dalam bahasa daerah/suku Wewewa (Dia yang menciptakan dan Dia yang menjadikan); AMA A MAGHOLO, INA A MARAWI – dalam bahasa daerah/suku Wewewa (Bapa yang membuat/mengukir, Ibu yang menenun/menjadikan; AMA PADEWAMA, INA PAURRAMA –

Dalam bahasa daerah/suku Wewewa (Tanpa Bapa kami tak bertuan, tanpa Ibu kami tak bertuan *atau* Bapa yang melindungi kami dan Ibu yang menjaga kami). Mantra-mantra ini biasanya dinyanyikan oleh RATO (imam Marapu) pada malam-malam tertentu,

Seperti pada malam saat upacara *saiso* ( upacara khusus berdialog dengan Marapu dengan wujud tertentu). Aliran ini meyakini bahwa segala aspek kehidupan saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang utuh

Berdasarkan data yang dikutip dari Sesawi.Net dalam artikel Sekila sprofil Keuskupan Weetebula, Pulau Sumba, NTT pada tahun 2008, penduduk Pulau Sumba sebanyak 644.144 jiwa. Komposisi penduduk berdasarkan agama adalah: Islam 26.606 jiwa (4,12 %), Kristen Protestan 391.739 jiwa (60,81%), Kristen Katholik 143.122



(22,22 %), Hindu 742 jiwa (0,12 %), dan penganut Marapu 81.953 jiwa (12,73 %).<sup>61</sup>

Data ini menunjukkan bahwa pemeluk aliran kepercayaan Marapu menempati urutan ketiga setelah Kristen Protestan dan Katholik. Namun, jumlah pemeluk Marapu semakin menyusut dari waktu ke waktu. Sebagaimana terjadi di Kabupaten Sumba Barat Daya, menurut data BPS tahun 2007, pemeluk Marapu di wilayah ini (saat itu masih bergabung dengan Kabupaten Sumba Barat) berjumlah 16,08 % dari total penduduk. Namun pada tahun 2012, jumlahnya tinggal 4,96 %. Dalam kurun waktu hanya 5 tahun,

Penurunannya lebih dari 3 kali lipat. Tren penurunan ini juga terjadi pada Kabupaten Sumba Barat dan dua kabupaten lainnya. Ada beberapa alasan di balik kenyataan ini. ***Pertama***, kebutuhan penganut Marapu akan kepemilikan agama resmi. Hal ini berkaitan dengan kepentingan dalam urusan kependudukan dan kebutuhan mengakses bantuan sosial dan layanan publik. ***Kedua***, pewartaan yang sangat kencang dan sistematis dari agama-agama modern. Dengan segala kedigdayaannya, seperti pengorganisasian, kapasitas manusia, pendanaan agama-agama modern melakukan pewartaan secara sistematis dan masif, sehingga kepercayaan Marapu kian terdesak dan tertekan. Perpindahan

<sup>61</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XIV/2016



agama diantara penganut agama-agama modern sangat kecil,kebanyakan karena alasan perkawinan. Pertambahan pemeluk paling besar diperoleh agama-agama modern dari penganut kepercayaan Marapu. *Ketiga*, perpindahan penganut Marapu ke agama-agama modern tidak sulit dan nyaris tidak menimbulkan tekanan sosial yang besar, jika dibandingkan bila hal itu terjadi di antara agama-agama modern. Hal ini diperkuat oleh kenyataan bahwa dengan menganut agama modern, mereka memiliki akses dan peluang lebih besar untuk maju dan berkembang.

Dengan identitasnya sebagai penganut kepercayaan, perkawinan antar pemeluk kepercayaan dari Komunitas Marapu yang dilakukan secara adat tidak diakui negara Akibatnya, anak-anak mereka sulit mendapatkan Akta Kelahiran. Demikian pula dengan persoalan KTP elektronik, untuk mendapatkan KTP elektronik dengan mudah, sebagian penganutnya terpaksa berbohong menuliskan agama di luar kepercayaannya pada KTP elektronik

Peristiwa yang dialami oleh Nggay Meheng Tena merupakan buah dari keberadaan pasal pasal UU Adminstrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa agama yang kolom agama di KK maupun KTP elektronik bagi penganut kepercayaan tidak diisi.

Dengan tidak diisinya kolom agama bagi penganut kepercayaan di KTP elektronik dan di KK,

Nggay Mehang Tena bersama komunitas Marapu lainnya dicap kolot, kafir dan sesat, dan berimbas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional, serta pelanggaran dalam pelayanan administrasi kependudukan.<sup>62</sup>

- b. Pemohon yang ke dua bernama **Pagar Denmara Sirait** yang bertempat tinggal di Gopgopan, Sampuara, Kecamatan Uluan, Toba Samosir, Sumatera Utara. Pagar Denmara Sirait merupakan penganut kepercayaan Parmalim di Sumatera Utara. Pusat Parmalim sendiri terletak di Kabupaten Toba Samosir, namun penganutnya menyebar ke berbagai wilayah, termasuk Kota Medan dan Deli Serdang. Berdasarkan penelusuran Tim Aliansi Sumut Bersatu pada Maret-April 2015, penganut Parmalim di Kabupaten Deli Serdang terdapat di kecamatan Sunggal Desa Mulia Rejo (92 Jiwa), dan di Kota Medan mereka tersebar di kecamatan Medan Denai, Medan Amplas, Medan Kota dan Medan Sunggal (total 373 Jiwa).

Penganut kepercayaan Parmalim mengalami berbagai permasalahan dan eksklusi dari aspek pemenuhan hak-hak dasar dan kebijakan publik, yakni banyaknya ketidakcocokan antara identitas agama yang dituliskan

<sup>62</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No 97 / PUU-XIV/2016 Tentang alira kepercayaan, 5

di Kartu Keluarga dan KTP elektronik. Selain itu, pihak kepala lingkungan yang bertugas mengurus KK dan KTP elektronik sering memaksa kelompok Parmalim untuk memilih agama yang ‘diakui’ agar proses pembuatan KTP elektronik dikatakan lebih “mudah”. Hal ini sebagaimana dialami Pagar Denmara Sirait.

Kerugian konstitusional yang dialami para penganut Parmalim, yakni ada yang disyaratkan berpindah agama terlebih dahulu jika mau diterima pada pekerjaan yang dilamarnya. Temuan lain dari Aliansi Sumut Bersatu juga yakni, seorang guru (Bharlin School) penganut Parmalim terpaksa harus mengundurkan diri karena pihak sekolah tidak mengizinkan dirinya untuk mengikuti ibadah dihari Sabtu.

Bahwa keberadaan Pasal 64 ayat (1) *juncto* ayat (5) UU Administrasi Kependudukan yang mengosongkan kolom agama bagi penghayat kepercayaan, telah merugikan Pagar Denmara Sirait dan para penghayat kepercayaan Parmalim. Karena dengan tidak diisinya kepercayaan di kolom agama KTP elektronik, berimbas pada pelanggaran dalam pemenuhan hak-hak kependudukan yang seharusnya bisa dinikmati Pagar Denmara Sirait Bahkan. dengan tidak dicantumkan agama kepercayaan didalam KTP elektronik Pemohon II, telah terjadi diskriminasi yang dialami oleh pemohon dalam berbagai bentuk, seperti: kesulitan mengakses pekerjaan, tidak dapat mengakses





Sejak Reformasi, para penganut aliran kepercayaan ini mulai menampakkan dirinya. Salah satunya di wilayah Kabupaten Brebes. Jumlah mereka sangat kecil dan kerap mendapat tekanan, baik dari kalangan penduduk sekitar yang menganggap mereka sebagai ‘sesat’ maupun pemerintah. Di wilayah Brebes jumlah penganutnya sekitar 192 orang yang tersebar di 9 Kecamatan: Brebes, Wanasari, Larangan, Kersana, Losari, Bulukumba, Ketanggungan, Bumi Ayu, dan Tanjung. Kebanyakan mereka adalah buruh tani, tukang bangunan, pedagang mainan keliling, nelayan dan profesi “wong cilik” lainnya. Perkembangan dan keberlangsungan kehidupan mereka sebagai komunitas hanya bertahan pada jaringan keluarga, yang juga kian melemah akibat berbagai tekanan politik dan sosial.

Kebanyakan penghayat Sapto Darmo berasal dari kelas menengah ke bawah, bahkan sebagian miskin dan proses pemiskinan terus berlangsung karena kebanyakan mereka hanya bersekolah sampai tingkat menengah. Selain faktor ekonomi, salah satu alasan mereka enggan meneruskan sekolah adalah adanya tuntutan, secara halus maupun kasar, agar mereka mengikuti pelajaran agama yang diakui pemerintah.

Bagi Carlim, keberadaan Pasal 61 ayat (1) *juncto* ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) *juncto* ayat (5) UU Administrasi Kependudukan telah

memberikan dampak bagi Carlim. Sebagai penghayat kepercayaan, karena di kolom elektronik kolom agamanya kosong.

Carlim dan penganut 10 Sapto Darma lainnya mendapat stigma sesat dari masyarakat umum. Akibat kolom agama yang kosong pula pemakaman keluarga dari Carlim ditolak di pemakaman umum manapun di Kabupaten Brebes. Hal ini telah dialami keluarga Carlim, dan jelas berpotensi juga terjadi kepada Carlim

Dampak lanjutan dari kekosongan kolom Agama di KTP elektronik yakni anak dari Carlim juga kesulitan untuk mengakses pendidikan dari masuk sekolah tingkat dasar, karena diketahui menganut Kepercayaan Sapto Darmo dan ketika telah sekolah anak dari Carlim dipaksa harus mengikuti mata pelajaran dan ajaran pendidikan Agama Islam yang mana hal itu bertentangan dengan keyakinan dan kepercayaannya sebagai Penghayat Kepercayaan Sapto Darmo.

Keberadaan Pasal 61 ayat (1) *juncto* ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) *juncto* ayat (5) UU Administrasi Kependudukan yang memerintahkan agar penganut kepercayaan atau bagi penganut agama yang belum diakui untuk Penduduk elektronik merupakan bentuk keengganan negara mengakui keberadaan para penganut kepercayaan serta penganut agama lain yang bukan mayoritas di Indonesia.





### Pasal 61

- (1) *KK memuat keterangan mengenai kolom Nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.*
- (2) *Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimana pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dalam database Kependudukan.*

### Pasal 64

- (1) *KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status, perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.*

---

<sup>66</sup> *Ibid*, 11





yang diskriminatif terhadap para penghayat kepercayaan atau bagi penganut agama yang belum diakui oleh negara. Dengan tidak diisinya kolom agama bagi para penghayat kepercayaan, maka hal demikian itu merupakan pengecualiaan yang didasarkan pada pembedaan atas dasar agama atau keyakinan yang mengakibatkan pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

5. Berdasarkan seluruh argumentasi di atas, para Pemohon berkesimpulan bahwa Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan:
- Prinsip negara hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945
  - Hak atas kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945
  - Hak atas jaminan kesamaan warga negara di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945

- d. Hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun sebagaimana diatur dalam pasal 28I ayat (2) UUD 1945

Sehingga oleh karenanya para pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan:

1. Kata “agama” dalam pasal 61 ayat (1) dan pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk juga “kepercayaan”
2. Pasal 61 ayat (2) dan pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Pertimbangan Hakim.

Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi 147 Kependudukan tidak mencerminkan jaminan perlindungan oleh negara terhadap hak atau kemerdekaan warga negara penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karenanya bertentangan dengan prinsip atau

gagasan negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:<sup>67</sup>

- a. Keberadaan Pasal 61 dan Pasal 64 UU Administrasi Kependudukan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dengan terbangunnya *database* kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan. KTP-el merupakan bagian dari upaya mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan secara nasional.

Upaya untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan melalui pembangunan *database* kependudukan sesuai dengan Undang-Undang *a quo* merupakan langkah yang sangat tepat untuk kemajuan hidup berbangsa dan bernegara. Sebab, perencanaan dan pelaksanaan program-program pemerintah akan berjalan baik apabila berangkat dari data kependudukan yang tertib dan benar.

Terlebih lagi jika merujuk pada Pasal 61 dan Pasal 64 yang berada di bawah sub-Bab “Dokumen Kependudukan” di mana dokumen kependudukan merupakan dokumen yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang mencakup pengaturan atas sejumlah hak warga Negara yang di dalamnya termasuk hak atas kebebasan beragama

---

<sup>67</sup> *Ibid*, 147-153

dan berkeyakinan. Oleh karena itu, upaya melakukan tertib administrasi kependudukan sama sekali tidak boleh mengurangi hak-hak warga negara dimaksud termasuk hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. *Database* kependudukan yang disusun haruslah dalam kerangka menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dimaksud sehingga *database* kependudukan akan tersusun secara lebih akurat, karena tidak akan ada warga negara yang terdata dalam *database* kependudukan yang elemen data kependudukan di dalamnya tidak diisi atau diisi secara tidak sesuai dengan apa sebenarnya agama atau keyakinan yang dianutnya.

- b. Pengertian terminologi “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) hanya akan ditemukan apabila dipahami konteksnya dengan ayat (2)-nya. Hal yang sama juga berlaku terhadap terminologi “agama” dalam Pasal 64 ayat (1) yang pengertiannya hanya dapat ditemukan dengan memahami konteksnya dengan ayat (5)-nya. Oleh karena itu, penilaian terhadap konstitusionalitas terminologi “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan itu pun harus diletakkan dalam konteks demikian.

Guna menilai konstitusionalitas konteks suatu Norma, terdapat tiga asas dalam penafsiran kontekstual, yaitu: *pertama*, asas *Noscitur a sociis*, yang mengandung pengertian bahwa suatu kata atau istilah harus

dikaitkan dengan rangkaiannya; *kedua*, asas *ejusdem generis*, yang mengandung pengertian bahwa makna suatu kata atau istilah dibatasi secara khusus dalam kelompoknya; dan *ketiga*, asas *expressio unius exclusio alterius* yang mengandung pengertian bahwa jika suatu konsep digunakan untuk satu hal maka ia tidak berlaku untuk hal lain.

Jika ketiga asas dalam penafsiran kontekstual diterapkan dalam permohonan *aquo*, maka:

- 1) sesuai dengan asas *Noscitur a sociis*, kata atau istilah “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan dalam Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan jika diperhatikan rangkaiannya dengan kata atau istilah “agama” dalam Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan telah ternyata bahwa kata atau istilah “agama” tersebut adalah dimaksudkan sebagai agama dalam pengertian “yang diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”, yang berarti tidak termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Sesuai dengan asas *ejusdem generis* telah ternyata pula bahwa kata atau istilah “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan dalam Pasal 64 ayat (1) maupun istilah “agama” dalam Pasal 61 ayat (2) dan dalam Pasal 64a yat (5) UU Administrasi Kependudukan oleh pembentuk undang-



undang memang digunakan semata-mata bagi pengertian agama “yang diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”, sehingga tidak dapat digunakan sebagai pengertian yang mencakup kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

- 3) Sesuai dengan asas *expressio unius exclusio alterius* juga telah ternyata bahwa pembentuk undang-undang memaksudkan konsep tentang “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta dalam Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan hanya dimaksudkan untuk digunakan terhadap satu hal, yaitu dalam hal ini agama“yang diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”, sehingga lagi-lagi dalam hal ini tidak mencakup pengertian kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan berdasar pada ketiga asas dalam penafsiran kontekstual di atas maka telah terbukti bahwa UU Administrasi Kependudukan, *in casu* Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5), berpegang pada atau menganut pendirian bahwa “agama” yang dimaksud adalah Agama yang diakui sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan kata lain, hak atau kemerdekaan warga negara untuk menganut agama dibatasi pada agama yang

diakui sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya, secara *a contrario*, tanggung jawab atau kewajiban konstitusional negara untuk menjamin dan melindungi hak atau kemerdekaan warga negara untuk menganut agama, yang sesungguhnya juga termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, juga terbatas pada warga negara yang menganut agama yang diakui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal inilah yang tidak sejalan dengan jiwa UUD 1945 yang secara tegas menjamin bahwa tiap-tiap warga Negara merdeka untuk memeluk agama dan kepercayaan dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan itu.

Bahwa adanya pernyataan dalam Pasal 61 ayat (2) dan dalam Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa bagi penghayat kepercayaan kolom “agama” tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam *database* Kependudukan, hal itu bukanlah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan jaminan negara bagi warga negara penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, melainkan semata-mata penegasan tentang kewajiban negara untuk memberikan pelayanan kepada setiap warga negarasesuai dengan data yang tercantum dalam *database* kependudukan yang memang merupakan tugas dan kewajiban negara.

Hal lain yang lebih fundamental adalah bahwa dengan analisis terhadap rumusan Norma dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan berarti Undang-Undang *a quo* secara implisit mengkonstruksikan hak atau kebebasan menganut agama, yang sesungguhnya juga termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebagai pemberian negara. Padahal sebaliknya, hak atau kemerdekaan menganut agama (termasuk menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa) adalah hak yang melekat pada setiap orang sebab hak itu diturunkan dari kelompok hak-hak alamiah (*natural rights*), bukan pemberian negara. Oleh karena hak beragama dan menganut kepercayaan merupakan salah satu hak asasi manusia maka sebagai negara hukum yang mempersyaratkan salah satunya adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, sehingga membawa konsekuensi adanya tanggung jawab negara untuk menjamin bahwa hak asasi warganya benar-benar ternikmati dalam praktik atau kenyataan sehari-hari.

Apalagi tatkala hak asasi tersebut tegas dicantumkan dalam Konstitusi, sehingga menjadi bagian dari hak konstitusional, maka tanggung jawab negara untuk menjamin penikmatan hak itu jadi makin kuat karena telah menjadi kewajiban konstitusional negara

untuk memenuhinya sebagai konsekuensi dari pengakuan akan kedudukan Konstitusi (*in casu* UUD 1945) sebagai hukum tertinggi (*supreme law*). Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa kata atau istilah “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) jika dihubungkan dengan Pasal 61 ayat (2) dan kata atau istilah “agama” dalam Pasal 64 ayat (1) jika dihubungkan dengan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan prinsip atau gagasan negara hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai termasuk “kepercayaan”, adalah beralasan menurut hukum

- c. Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta melanggar jaminan kesamaan warga negara di hadapan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berpendapat sebagai berikut
- 1) Bahwa dengan tidak dianutnya pengertian terminologi “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan dalam Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan termasuk kepercayaan, maka dengan sendirinya Norma Undang-Undang *a quo* tidak memberikan pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi warga negara penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan warga negara yang oleh Undang-Undang *a quo* disebut menganut “agama yang diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”. Dengan pendirian pembentuk undang-undang bahwa yang dimaksud “agama” adalah agama dalam pengertian yang diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan maka bagi penganut kepercayaan sudah pasti tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil lebih-lebih perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pengakuan tidak mungkin didapat karena kepercayaan tidak dimasukkan ke dalam pengertian agama.

Demikian pula halnya dengan kepastian hukum. Sebab kepastian hukum itu didapat oleh penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah kepastian bahwa mereka bukan penganut agama yang diakui sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini sekaligus tidak memungkinkan bagi mereka menikmati perlakuan yang sama di hadapan hukum secara adil sebab secara konseptual dalam konstruksi UU Administrasi Kependudukan mereka sudah tidak dimasukkan ke

dalam pengertian agama. Demikian juga apabila dikaitkan dengan jaminan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, sejak awal penganut kepercayaan sudah dibedakan dengan penganut agama yang diakui sesuai dengan peraturan perundang-undangan di mana pembedaan demikian, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, tidak didasarkan pada alasan yang konstitusional. Sementara, kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tetap melekat pada mereka sebagai warga negara Indonesia. Selain itu, secara faktual keberadaan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan pada faktanya telah menimbulkan ketidakpastian, penafsiran yang berbeda, dan tidak konsisten dengan Norma lainnya dalam undang-undang yang sama seperti dengan Pasal 58 ayat (2), di mana hal itu menimbulkan akibat bahwa warga negara penghayat kepercayaan kesulitan memperoleh KK maupun KTP-el.

Dengan dikosongkannya elemen data kependudukan tentang agama juga telah berdampak pada pemenuhan hak-hak lainnya, seperti perkawinan dan layanan kependudukan. Sehingga, penganut kepercayaan tidak mendapatkan jaminan kepastian dan persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana diperoleh warga negara lainnya. Pada saat yang sama, hal demikian

Berdasarkan uraian di atas, dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 sepanjang kata “agama” dalam pasal *a quo* tidak dimaknai termasuk kepercayaan adalah beralasan menurut hukum.

[illegible]

secara diskriminatif sebagaimana dijamin oleh Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a) Dengan mengacu pada pengertian diskriminasi dalam putusanputusan Mahkamah, di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 070/PUU-II/2004, bertanggal 12 April 2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-III/2005, bertanggal 29 Maret 2006, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007, bertanggal 22 Februari 2008, perbedaan pengaturan antar warga negara dalam hal pencantuman elemen data penduduk, menurut Mahkamah tidak didasarkan pada alasan yang konstitusional. Pengaturan tersebut telah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama, yakni terhadap warga negara penghayat kepercayaan dan warga negara penganut agama yang diakui menurut peraturan perundang-undangan dalam mengakses pelayanan publik. Lagi pula jika dikaitkan dengan pembatasan terhadap hak dan kebebasan dengan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, menurut Mahkamah pembatasan demikian tidak berhubungan dengan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan bukan pula untuk memenuhi tuntutan yang adil dalam kehidupan masyarakat yang demokratis.



Oleh karena itu, dalil para Pemohon bahwa ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sepanjang kata “agama” dalam pasal *a quo* tidak dimaknai termasuk kepercayaan adalah beralasan menurut hukum.

- [illegible]





Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasara  
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan  
hukum mengikat;

- d. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Putusan atau amar putusan Hakim diatas tidak hanya memasukan aliran kepercayaan dalam kolom KTP tapi juga mempertegaskan kembali tentang pengertian Agama dan Aliran kepercayaan, Bahwa antara Agama dan Aliran kepercayaan berbeda dalam hal pengertian Hukum, kalimat penekanan ini terdapat pada amar putusan yang berbunyi

Menyatakan **kata “agama”** dalam pasal 61 ayat (1) dan pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”**;

Terdapat Frasa Agama pada pasal di UU administrasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan Hukum sepanjang tidak termasuk kepercayaan, Frasa ini menandakan dan penekanan bahwa antara Agama dan Aliran kepercayaan dari pengertian Hukum sudah berbeda.



Penulisan pada Kolom Agama di KTP berbeda bagi aliran kepercayaan karena menurut dirjen kependudukan dan pencatatan sipil kemendagri Zudan Arif Fakrullah penyematan kolom aliran kepercayaan sudah berlaku nasional akan tetapi secara teknis memang penulisan aliran kepercayaan dalam kolom KTP berbeda yang dimasukkan bukan organisasi atau nama aliran kepercayaannya, akan tetapi memasukan “kepercayaan terhadap ketuhanan yang maha esa”.<sup>70</sup>

beliau juga bagi warga Negara yang masih merawat ajaran leluhur identitas yang sudah ada jangan diseragamkan.<sup>72</sup>

Maksud dari diseragamkan adalah bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi sudah jelas bahwa aliran kepercayaan pun bisa masuk kolom KTP tentunya yang di tulis dalam kolom KTP tentang aliran kepercayaan adalah nama aliran kepercayaan atau organisasi/ paguyupan dari aliran kepercayaan atau kebatinan tersebut, bukan malah ditulis kepercayaan kepada tuhan yang maha esa, tentunya dengan penulisan ini ada keseragaman dari ribuan aliran kepercayaan atau kebatinan hanya tertulis sama yaitu kepercayaan kepada tuhan yang maha esa, oleh sebab itu Kementerian dalam Negeri sebagai pelaksana dari putusan Mahkamah konstitusi tentang aliran kepercayaan masih dianggap dianggap kurang optimal

<sup>72</sup> Dewi kanti setianingsih, “Ini hak dasar harus tanpa syarat”, *Jawa Post*, (27 Februari 2019), 15

KEDUDUKAN ALIRAN KEPERCAYAAN DALAM PENCATATAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NO 1/1965 TAHUN 1965 PASCA PUTUSAN NO 97/PUU-XIV/2016 TENTANG  
ALIRAN KEPERCAYAAN PERSPEKTIF *MAQĀSID AL-SYARĪ'AH*

Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XIV/2016 tentang Aliran kepercayaan, ditanggapi beragam oleh masyarakat terutama pendapat yang mengatakan bahwa pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah menyamakan antara aliran kepercayaan dan Agama, salah satu alasannya bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini mengatakan bahwa kolom Agama dalam KTP sepanjang tidak diartikan sebagai kepercayaan maka tidak mempunyai kekuatan Hukum, sehingga jika tidak mempunyai kekuatan Hukum maka antara aliran kepercayaan dan Agama berada pada tempat yang sama.

[illegible]





Sehingga jika menurut Undang – Undang Dasar 1945 pasal 28 E dan 29 dan Undang-Undang No 1/PNPS tentang tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan atau/PeNodaan Agama pada Penjelasan pasal 1, Maka antara Agama dan aliran kepercayaan mempunyai perlindungan yang sama oleh Negara.

Sedangkan permasalahannya adalah terdapat pada Kolom Agama dalam KTP pada pasal 64 ayat (5) tentang Undang-Undang Administrasi kependudukan,

menjelaskan bahwa ; “Elemen data penduduk tentang Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang Agamanya belum diakui sebagai Agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tdk diisi, tetapit tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.”

Jika melihat dari peraturan diatas maka ada perbedaan kedudukan antara Agama dan aliran kepercayaan karena sebagaimana pengertian Dokumen kependudukan yang mencakup hak warga Negara pengosongan kolom Agama dalam KTP tetap membedakan kedudukan antara Agama dan Aliran kepercayaan, walaupun dalam database kependudukan aliran kepercayaan tetap dicatatkan.

Persoalan kedudukan antara Agama dan Aliran kepercayaan jika melihat pada pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu ; “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk Agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu”. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahasa atau frasa yang dipakai adalah “Dan” pada kalimat “Agamanya dan kepercayaan itu” penyebutan kata “Agamanya” dan kata “Kepercayaannya” secara berberbarengan dengan menggunakan kata penghubung “Dan” Maka antara Agama dan kepercayaan kedudukannya sejajar.

Walaupun dalam kedudukan antara Agama dan Kepercayaan sejajar akan tetapi sejatinya antara Agama dan Kepercayaan adalah dua hal yang berbeda,

walaupun dalam pengertian Agama sendiri adalah kepercayaan akan tetapi dalam Undang – Undang di Indonesia menempatkan atau mengelompokkan antara Agama dan Kepercayaan pada tempat yang berbeda. Dalam Undang – Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat (2) dimana sebagai dasar dari kebebasan beragama dan kepercayaan yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk Agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu”. Frasa Agamanya dan Kepercayaannya ditulis keduanya sehingga antara Agama dan Kepercayaan adalah dua hal yang berbeda, jika memang sama antara Agama dan Kepercayaan maka tentunya dalam Undang – Undang Dasar 1945 tidak ditulis “agamanya dan kepercayaan itu” akan tetapi cukup ditulis “Untuk beribadah menurut Agamanya itu”.

Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XIV/2016 tentang Aliran kepercayaan. Membawa angin perubahan untuk warganegara yang memeluk aliran kepercayaan, tentunya penulisan aliran kepercayaan dalam Kolom Agama kembali mengakomodir dan tidak mendiskriminasikan aliran kepercayaan. Kemendagri selaku instansi yang melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa untuk masyarakat yang memeluk aliran kepercayaan dalam kolom Agama di KTP diganti menjadi Kepercayaan dan diisi kepercayaan kepada Tuhan YME tentunya pelaksanaan perubahan kolom Agama dianti menjadi kepercayaan terhadap Tuhan YME sudah sejalan dengan Undang – Undang No 1/PNPS tentang pencegahan, penyalahgunaan dan/atau

peNodaan Agama pada penjelasan pasal 1 yang isinya “Terhadap Badan/aliran kebatinan, pemerintah berusaha menyalurkan kearah pandangan yang sehat dan kearah Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan ketetapan M.P.R.S No II/MPRS/1960, lampiran 1, angka 6”.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendagri ini semakin menguatkan bahwa antara Agama dan aliran kepercayaan adalah dua hal yang berbeda akan tetapi keduanya berada pada posisi sejajar.

**B. Kedudukan aliran kepercayaan dalam pencatatan administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1965 pasca putusan No 97/PUU-XIV/2016 tentang aliran kepercayaan Perspektif *Maqāṣid Al-syari'ah*.**

Pengertian dari Maqāṣid berasal dari bahasa Arab مقاصد (*maqasid*), yang merupakan bentuk jamak kata (*maqṣad*), yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan akhir. Terma itu berarti *telos* (dalam bahasa Yunani) *finalite* (Prancis), atau Zweck (Jerman). Maqāṣid hukum Islam adalah sasaran-sasaran atau maksud-maksud dibalik hukum itu. Bagi sejumlah teoretikus hukum Islam, Maqāṣid adalah pernyataan alternatif untuk مصالح (*masalih*) atau ‘kemaslahatan-kemaslahatan’.

Jika dilihat dari tujuan dari *Maqāṣid Al-syari'ah* adalah kemaslahatan tetunya berbicara tentang bagaimana adanya sebuah Hukum yang dibuat oleh pemerintah yang mempunyai kemaslahatan bagi rakyatnya, Kemaslahatan yang



jika tidak ada penutup aurat maka seseorang boleh saja shalat jangan sampai meninggalkan shalat yang termasuk daruriyat.

Dalam pemahaman sekarang, kelima utama maslahat itu akan berbunyi sebagai berikut: Melindungi kebebasan beragama (*hifdzu al-din*). Melindungi kelangsungan hidup (*hifdzu al-nafs*). Melindungi kelangsungan keturunan (*hifdzu al-nasl*). Melindungi hak milik/property (*hifdzu al-mal*). Melindungi kebebasan berpikir (*hifdzu al-'aql*). Kelima maslahat primer diatas bisa berkembang sesuai dengan tempat dan waktu bahkan bisa menjadi enam, tujuh, delapan dan seterusnya. Maslahat primer (*daruriyyat*) elastis, tidak stagnan dan bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia.

Dalam membahas kedudukan Agama dan Aliran kepercayaan Pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XIV/2016 tentang Aliran kepercayaan. Bahwa ketika berbicara ketatanegaraan tentunya terdapat kebebasan beragama, dikarenakan bahwa Agama adalah termasuk kedalam hak asasi manusia dimana hak itu secara langsung menempel pada diri setiap manusia.

Islam sendiri melarang adanya paksaan dalam beragama kerana Agama bergantung kepada keyakinan dan kehendak hati terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang kebebasan beragama

Al-Baqarah ayat 256

“ Tidak ada paksaan untuk (memasuki) Agama (Islam) sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. Karena itu barang



siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada Buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”

Yunus Ayat 99:

“Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di muka bumi seluruhnya maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?”

Jika melihat dari ke dua surat tersebut bahwa tentunya bahwa setiap orang tidak bisa memaksakan Agama terhadap orang yang lain, menjadi hak setiap orang untuk meyakini bahwa Agama yang dianutnya adalah benar, dan begitupun sebaliknya setiap orang harus menghormati Agama yang diyakini oleh orang lain. Toleransi antar Agama telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu dalam Piagam Madinah, dalam piagam Madinah ini bahwa Nabi memberikan kebebasan beribadah dan memeluk Agama bagi Agama diluar Islam, bahkan tidak hanya memberi kebebasan akan tetapi juga menjadikan mitra dalam urusan kenegaraan.

Dalam piagam Madinah ini juga Nabi mencontohkan bagaimana menjalin komunikasi antara beda suku dan Agama yang berbagai latar belakang yang berdasarkan kepada nilai-nilai persamaan dan kemanusiaan, sehingga adanya Piagam Madinah pada saat ini menyatukan berbagai macam suku dan Agama untuk saling menghormati demi terwujudnya kesatuan persatuan antara pemeluk agama lain dan suku yang lain.







## PENUTUP

Setelah melakukan penelitian maka dari dua rumusan masalah setidaknya bisa diambil dua kesimpulan, antara lain:

1. Persoalan kedudukan antara Agama dan Aliran kepercayaan jika melihat pada pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu ; “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk Agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu”. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahasa atau frasa yang dipakai adalah “Dan” pada kalimat “Agamanya dan kepercayaan itu” penyebutan kata “Agamanya” dan kata “Kepercayaannya” secara berbarengan dengan menggunakan kata penghubung “Dan” Maka antara Agama dan kepercayaan kedudukannya sejajar.

[illegible]

antara Agama dan Kepercayaan maka tentunya dalam Undang – Undang Dasar 1945 tidak ditulis “agamanya dan kepercayaan itu” akan tetapi cukup ditulis “Untuk beribadah menurut Agamanya itu”.

2. Islam sendiri melarang adanya paksaan dalam beragama kerana Agama bergantung kepada keyakinan dan kehendak hati, Nabi mencontohkan kebebasan beragama dalam Piagam Madinah sehingga keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XIV/2016 tentang aliran kepercayaan Dengan kedudukan yang sama di mata Negara maka Negara juga memberikan perlindungan yang sama, sehingga asas kebebasan beragama dan tanpa memaksakan Agama terhadap orang lain yang termuat dalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 29 bisa terlaksana, tentunya adanya kebebasan Agama di Indonesia sejalan dengan salah satu pokok dalam *Maqāsid Al-syarī'ah* yaitu kebebasan beragama (*hifdzu al-din*).

### B. Saran.

Pasca keluarnya putusan No 97/PUU-XIV/2016 tentang aliran kepercayaan, seharusnya pihak terkait melakukan konsolidasi terutama terkait pemahaman putusan tersebut kepada tokoh atau perwakilan 6 Agama dan Aliran kepercayaan di Indonesia, sehingga bisa menyinergikan putusan tersebut kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum.*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abu Zahra, Muhammad. *Ushul Fiqh*. Damaskus: Darr al-Fikr, tt.
- al-Ubaidi, Hambadi. *As-Syatibi wa Maqasidus Syari'ah* (Beirut; Darul Kutub, tt) Shiddiq, Sapiudin. *ushul fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011).
- Asafri, Jaya Bakri, *Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Asshidiqie, jimml. *Model-model pengujian Konstitusi di berbagai Negara*, Jakarta : Konpres, 2005.
- Denny JA, Islam, *Negara Sekuler, dan Demokrasi.*, Jakarta : Putra Berdikari Bangsa, 2000.
- Effendy, Bahtiar. *Teologi baru politik Islam : pertautan Agama, Negara, dan Demokrasi*. Yogyakarta : Galang Press, 2001.
- Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta; PT. Buana Ilmu Populer, 2009.
- K.C. Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern*. Jakarta; Pustaka Eureka, 2003.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan, mentalitas, dan pembangunan*. Jakarta : Gramedia, 1985.
- M. Dien Syamsudin, *"Usaha pencarian Konsep Negara dalam sejarah pemikiran politik Islam*. Ulumul Quran : No 2 Vol. IV, 1993.
- Malik al-Juwaini, Abdul. Ghiyas al-Umam fi Iltiyas al-Zulam, ed. Husayn 'Ali Alyadri dan Sa'id Fuda, edisi ke-1, vol.5, ('Amman: Dar al-Bayariq, 1999). Lihat juga Al-Amidi, al-Ihkam, vol.4, 286
- Marzuki wahid, *Fiqh Indonesia*. Jawa Barat : ISIF, 2014.
- mohammad al-Tahir ibn Ashur, mohammad. *Treatise on Maqasid al-Syari'ah*, terjemahan Muhammad ei-Tahir el-Mesaw.i. (London, Washington: International Institute of Islamic Thoght (IIIT), 2006),
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia edisi Revisi*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi No 97 / PUU-XIV/2016 Tentang aliran kepercayaan.

Ramadhan Hasan, Khalid. Mu'jam Ushul Fiqh, Cet ke-1, (tk, al-Raudah, 1998).

Satjipto Rahardjo, *Wajah Hukum di Era Reformasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Siahaan, Maruar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010.

Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah, dan pemikiran*  
Jakarta : UI Prees, 1990.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum ; Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty, 2005.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung : Alfabeta, 2012.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Tutik, Titik triwulan, Konstruksi hukum tatanegara Indonesia pasca amandemen UUD 1945. Jakarta: prenada media grub,2010.

## Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

UU no 1/PNPS/ 1965 tentang Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan Agama

UU No 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

## UUD 1945

von Jhering, Rudolf. Law as a Means to an End (Der Zweck im Recht),terjemahan Isaac Husik, edisi ke-2 (New jersey: The Lawbook Exchange (pada mulanya dipublikasikan pada 1913 oleh Boston Book Co,)2001),

Wahab El-Affendi, Abdel. *Masyarakat tak bernegara : kritik teori Islam ahli bahasa Amiruddin ar-rani*. Yogyakarta : LKiS, 1994.

yamin, Muhammad. *Naskah persiapan UUD 1945, jilid I*, Jakarta : Yayasan Prapanca, 1959.



## BIODATA PENULIS

Nama : Tri Sutrisno

Tempat Tangal Lahir : Surabaya, 21 September 1988

Fakultas/Prodi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel/ Hukum Tata Negara

Nim : F52217051

Pendidikan : SDN Karah 1 Surabaya (1994-2000)

SLTP YPM 1 Sepanjang (2000-2003)

SMK Kartika 2 Surabaya (2003-2006)

S1 UIN Sunan Ampel Surabaya (2013-2017)

S2 Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya (2017-2019)

Karya Tulis : 1. Analisis Yuridis terhadap pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam penerapan putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar kawin.

2. Implikasi Yuridis kedudukan aliran kepercayaan dalam pencatatan administrasi berdasarkan undang-undang no. 1/PNPS Tahun 1965

(Studi putusan penerapan Mahkamah Konstitusi no 97/PUU-XIV/2016 tentang aliran kepercayaan perspektif maqāsid al-syarī'ah)